

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil Penelitian

5.1.1 Deskripsi Data

Pemerintah Kabupaten Manggarai yang merupakan salah satu bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola potensi sumber daya daerahnya sendiri. Untuk kelangsungan dan kemajuan dari Kabupaten Manggarai maka diharapkan Kabupaten Manggarai mampu menggali, mengelola, dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Manggarai. Dengan terus menggali, mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Manggarai, maka nantinya Kabupaten Manggarai akan mampu mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

5.2 Analisis Data dan Pembahasan

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam bidang keuangan untuk kurun waktu 2018-2020. Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Manggarai adalah: kinerja pendapatan daerah, kinerja belanja daerah, dan kinerja pembiayaan daerah.

Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Manggarai yang didapat dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintah Kabupaten Manggarai. Dari data tersebut nantinya dapat diketahui Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai. Adapun hasil dari Analisis Rasio tersebut adalah sebagai berikut :

a. Analisis Kinerja Pendapatan Daerah

Kinerja Pendapatan Daerah adalah ukuran dari seberapa baik pemerintah daerah dapat memperoleh pendapatan untuk membiayai program dan kegiatan pemerintahan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat didaerah tersebut. Kinerja pendapatan daerah dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti Varians Pendapatan, Pertumbuhan Pendapatan, Analisis Rasio Kemampuan Daerah Memperoleh PAD, dan ketergantungan Keuangan Daerah. Berikut ini akan dijabarkan data pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2018-2020 sebagai berikut :

Tabel 5.1
Data Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai
Tahun 2018-2020

Akun	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Asli Daerah	95.454.907.404	89.904.635.200	94,18	95.319.150.242	103.585.928.126	108,67	93.295.833.462	96.873.499.070	103,83
Pendapatan Transfer	962.646.002.683	956.555.834.690	99,37	1.060.527.054.024	1.057.995.476.037	99,75	822.523.124.552	818.179.913.522	99,47
Pendapatan Pajak Daerah	28.276.893.027	20.638.838.490	72,99	28.416.288.536	19.159.709.110	67,43	20.383.832.155	14.431.629.499	70,80
Dana Perimbangan	809.902.885.992	807.048.799.228	99,65	882.687.061.917	880.007.846.510	99,70	797.345.881.879	791.615.772.467	99,28
Tranfer Provinsi	26.957.794.691	23.721.713.462	88,00	28.707.038.107	28.854.675.527	100,51	25.177.242.673	26.564.141.055	100,51
Lain-lain Pendapatan yang Sah	52.811.400.000	51.487.747.250	97,49	69.094.400.000	67.819.270.911	98,15	240.014.833.000	241.284.054.544	100,53
Pendapatan Daerah	1.110.912.310.087	1.097.948.217.140	98,83	1.224.940.604.266	1.229.400.675.074	100,36	1.155.833.791.014	1.156.337.467.137	100,04

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kab. Manggarai 2018-2020 (data diolah)

Tabel 5.1 menunjukkan data target dan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai, adapun perhitungan rasio yang dapat dihasilkan sebagai berikut:

1 Analisis Varians (selisih) Pendapatan

Analisis Varians pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang di anggarkan. Biasanya selisih anggaran sudah di informasikan dalam laporan realisasi anggaran yang sudah disajikan oleh pemerintah daerah. Informasi selisih anggaran tersebut sangat membantu pengguna laporan dalam memahami dan menganalisis kinerja pendapatan.

Pemerintah Daerah memiliki kinerja yang baik ketika pendapatan lebih besar dari pada anggaran. Berikut ini analisis varians pendapatan di rumuskan sebagai berikut :

$$\text{Varians Pendapatan} = \text{Realisasi Pendapatan} - \text{Anggaran Pendapatan}$$

Tabel 5.2
Kriteria Varians (selisih) Pendapatan

Varians Pendapatan	Kriteria
Varians positif atau realisasi pendapatan \geq anggaran pendapatan	Baik
Varians negative atau realisasi pendapatan \leq anggaran pendapatan	Kurang baik

Sumber : Mahmudi, 2010:137

$$\text{Tahun 2018} = \text{Rp. } 1.097.948.217.140 - \text{Rp. } 1.110.912.310.087$$

$$= \text{Rp. } (12.964.092.947)$$

$$\text{Tahun 2019} = \text{Rp. } 1.229.400.675.074 - \text{Rp. } 1.224.940.604.266$$

$$= \text{Rp. } 4.460.070.808$$

$$\text{Tahun 2020} = \text{Rp. } 1.156.337.467.137 - \text{Rp. } 1.155.833.791.014$$

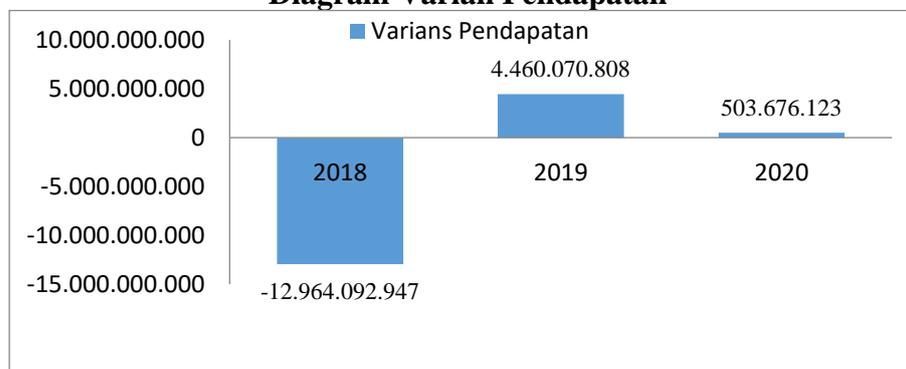
= Rp. 503.676.123

Tabel 5.3
Varians (selisih) Pendapatan
Kabupaten Manggarai 2018-2020

Tahun	Pendapatan (Rp)		Varians(Rp)	Kinerja
	Realisasi	Anggaran		
2018	1.097.948.217.140	1.110.912.310.087	(12.964.092.947)	Kurang Baik
2019	1.229.400.675.074	1.224.940.604.266	4.460.070.808	Baik
2020	1.156.337.467.137	1.155.833.791.014	503.676.123	Baik

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kab. Manggarai 2018-2020 (data diolah)

Gambar 5.1
Diagram Varian Pendapatan



Berdasarkan hasil analisis diatas maka analisis varians pendapatan menunjukkan bahwa pada tahun 2018 kinerja pengelolaan pendapatan kurang baik yakni mengalami selisish sebesar (Rp.12.964.092.947), dari total yang dianggarkan. Pada tahun 2019 dan tahun 2020 kinerja pengelolaan pendapatan semakin baik dilihat dari selisih anggaran dengan realisasi yakni pada tahun 2019 sebesar Rp.4.460.070.808, dan pada tahun 2020 sebesar Rp.503.676.123 ini menunjukkan kinerja pengelolaan pendapatan pemerintah Kabupaten Manggarai baik. Dapat disimpulkan bahwa kinerja pengelolaan pendapatan pemerintah Kabupaten Manggarai tahun 2018 sampai tahun 2020 cenderung mampu memenuhi target pendapatan yang sudah dianggarkan sebelumnya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja pengelolaan pendapatan pemerintah Kabupaten Manggarai dari tahun 2018 hingga tahun 2020 cenderung membaik. Kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi atau melampaui target pendapatan yang telah dianggarkan sebelumnya. Tentunya, dalam hal ini kinerja pengelolaan pendapatan yang baik ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan. Dengan mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi, meningkatkan pendapatan asli daerah, dan memperkuat mekanisme pengumpulan pendapatan akan menjadi kunci dalam mencapai keberhasilan. Dan juga perlu adanya pengawasan dan evaluasi dari pihak-pihak terkait yang akan membantu dalam menjaga keseimbangan antara anggaran dan realisasi pendapatan serta meningkatkan kinerja pengelolaan pendapatan daerah secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Heri Carvalho: *“Penyebabnya adalah penentuan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terlampau tinggi sementara disisi lain belum optimalnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah serta tingkat kesadaran masyarakat wajib pajak dan wajib retribusi belum maksimal sehingga realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mencapai target”*. (Wawancara Senin, 5 Juni 2023)

2 Analisis Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Analisis Pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan tersebut positif dan meningkat.

Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif, maka hal ini menunjukkan terjadi penurunan kinerja pendapatan (Abdul Halim : 2004). Adapun rumus dalam analisis rasio pertumbuhan pendapatan adalah sebagai berikut :

$$PP_{Th t} = \frac{\text{Pendapatan Th } t - \text{Pendapatan Th } (t - 1)}{\text{Pendapatan Th } (t - 1)} \times 100\%$$

Tabel 5.4
Kriteria Pertumbuhan Pendapatan

Rasio Pertumbuhan Pendapatan	Kriteria
Pertumbuhan Pendapatan \geq inflasi	Baik
Pertumbuhan Pendapatan \leq inflasi	Kurang baik

Sumber : Mahmudi, 2010:139

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{\text{Rp. 1.097.948.217.140} - \text{Rp. 1.111.538.011.520}}{\text{Rp. 1.111.538.011.520}} \times 100\% \\ &= (1,22\%) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= \frac{\text{Rp. 1.229.400.675.074} - \text{Rp. 1.097.948.217.140}}{\text{Rp. 1.097.948.217.140}} \times 100\% \\ &= 11,97\% \end{aligned}$$

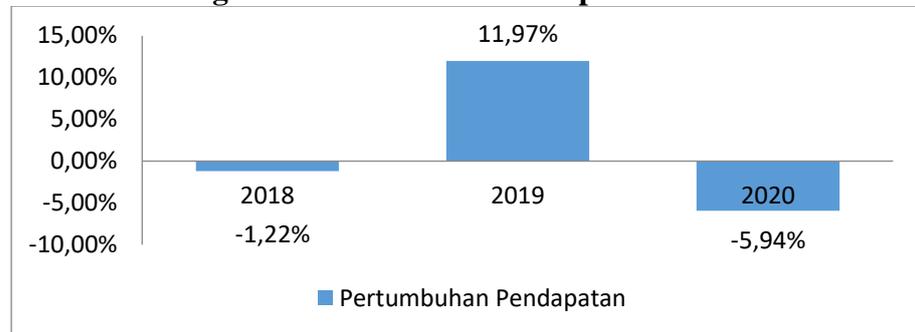
$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020} &= \frac{\text{Rp. 1.156.337.467.137} - \text{Rp. 1.229.400.675.074}}{\text{Rp. 1.229.400.675.074}} \times 100\% \\ &= (5,94\%) \end{aligned}$$

Tabel 5.5
Pertumbuhan Pendapatan
Kabupaten Manggarai 2018-2020

Tahun	Pendapatan Tahun t (Rp)	Pendapatan Tahun t-1 (Rp)	Pertumbuhan Pendapatan	Kinerja
2017	1.111.538.011.520	-	-	
2018	1.097.948.217.140	1.111.538.011.520	(1,22%)	Kurang Baik
2019	1.229.400.675.074	1.097.948.217.140	11,97%	Baik
2020	1.156.337.467.137	1.229.400.675.074	(5,94%)	Kurang Baik
Rata-rata	3.483.686.359.351	3.438.886.903.734	1,30%	Baik

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kab. Manggarai 2018-2020 (data diolah)

Gambar 5.2
Diagram Pertumbuhan Pendapatan



Berdasarkan hasil analisis rasio pertumbuhan diatas menunjukan bahwa pertumbuhan pendapatan pemerintah Kabupaten Manggarai belum stabil dimana pada tahun 2018 pertumbuhannya mengalami penurunan sebesar (1,22%), pada tahun 2019 mengalami peningkatan yakni mencapai sebesar 11,97%, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan yakni mencapai sebesar (5,94%). Dan ini menunjukan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Manggarai belum mampu mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah.

Berdasarkan uraian diatas, pertumbuhan pendapatan pemerintah Kabupaten Manggarai dalam tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan pendapatan belum stabil. Penurunan pertumbuhan pada tahun 2018 dan 2020 mengindikasikan bahwa pemerintah daerah cenderung belum mampu mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah secara konsisten. dalam hal ini untuk mencapai stabilitas dalam pertumbuhan pendapatan, Pemerintah Kabupaten Manggarai harus terus melakukan evaluasi terhadap optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi, peningkatan pemanfaatan sumber daya, pengembangan sektor

ekonomi potensial, serta penguatan mekanisme pengelolaan dan pengumpulan pendapatan. Dan juga diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memenuhi kewajiban pajak, memperkuat sistem pengawasan terkait penghindaran pajak, serta mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah.

Berdasarkan hasil wawancara *pertumbuhan pendapatan Kabupaten Manggarai belum stabil karena belum adanya pemutakhiran data potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang riil sehingga pertumbuhan realisasinya menjadi tidak stabil.* (Wawancara Senin, 5 Juni 2023)

3 Analisis Rasio Kemampuan Daerah Memperoleh PAD

a) Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio ini menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus:

$$DD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 5.6
Kriteria Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio Derajat Desentralisasi	Kemampuan Keuangan
00,00% - 10,00%	Sangat kurang
10,01% - 20,00%	Kurang
20,01% - 30,00%	Cukup
30,01% - 40,00%	Sedang
40,01% - 50,00%	Baik
50,01% - 60,00%	Sangat baik

Sumber : Mahmudi, 2010

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{\text{Rp.89.904.635.200}}{\text{Rp.1.097.948.217.140}} \times 100\% \\ &= 8,19\% \end{aligned}$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{\text{Rp.103.585.928.126}}{\text{Rp.1.229.400.675.074}} \times 100\%$$

$$= 8,43\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{\text{Rp.96.873.499.070}}{\text{Rp.1.156.337.467.137}} \times 100\%$$

$$= 8,38\%$$

Tabel 5.7
Derajat Desentralisasi
Kabupaten Manggarai 2018-2020

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan daerah (Rp)	Rasio Derajat Desentralisasi	Kemampuan Keuangan
2018	89.904.635.200	1.097.948.217.140	8,19%	Sangat Kurang
2019	103.585.928.126	1.229.400.675.074	8,43%	Sangat Kurang
2020	96.873.499.070	1.156.337.467.137	8,38%	Sangat Kurang
Rata-rata	290.364.062.396	3.483.686.359.351	8,33%	Sangat Kurang

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kab. Manggarai 2018-2020 (data diolah)

Gambar 5.3
Diagram Derajat Desentralisasi



Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa rasio derajat desentralisasi Kabupaten Manggarai selama tahun 2018-2020 adalah sangat kurang, yang ditunjukkan oleh rasio derajat desentralisasi yang berada pada rentang 00,00% - 10,00%. Begitupun dengan rata-rata rasio derajat desentralisasi sebesar 8,33% yang juga berada pada rentang 00,00%-10,00% selama tahun 2018-2020, dimana hal ini

mengindikasikan pendapatan asli daerah masih memiliki kontribusi yang rendah dalam menghasilkan total pendapatan daerah.

Berdasarkan uraian diatas Untuk meningkatkan rasio derajat desentralisasi, pemerintah daerah Kabupaten Manggarai perlu melakukan upaya terhadap penguatan potensi pendapatan asli daerah dengan meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya alam dan potensi ekonomi lainnya, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak dan retribusi. Dan juga pemerintah daerah harus berupaya untuk meningkatkan akses dan pemanfaatan sumber daya alam dengan memperkuat kerjasama dengan sektor swasta dan pihak-pihak terkait lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan “*Kemampuan daerah untuk memperoleh PAD belum maksimal penerimaan pajak dan retribusi daerah masih belum mencapai target yang ditetapkan sehingga pemerintah daerah perlu melakukan analisis potensi-potensi yang ada di daerah dan mengembangkan potensi tersebut sebagai pemasukan daerah*”. (Wawancara Senin, 5 Juni 2023)

b) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Mahsum dalam Dwijyanti dan Ruserlistyanti (2013), kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$KK = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}}$$

Tabel 5.8
Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
00,00% - 25,00%	Rendah Sekali	Instruktif
25,01% - 50,00%	Rendah	Kosultatif
50,01% - 75,00%	Sedang	Partisipatif
75,01% - 100,00%	Tinggi	Delegasi

Sumber : Mahmudi, 2010

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{\text{Rp.89.904.635.200}}{\text{Rp.807.048.799.221} + \text{Rp.23.721.713.462}} \times 100\% \\ &= 10,82\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= \frac{\text{Rp.103.585.928.126}}{\text{Rp.880.007.846.510} + \text{Rp.28.854.675.527}} \times 100\% \\ &= 11,40\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020} &= \frac{\text{Rp.96.873.499.070}}{\text{Rp.791.615.772.467} + \text{Rp.26.564.141.055}} \times 100\% \\ &= 11,84\% \end{aligned}$$

Tabel 5.9
Rasio Kemandirian Keuangan
Kabupaten Manggarai 2018-2020

Tahun	PAD (Rp)	Transfer Pusat (Rp)	Transfer Provinsi (Rp)	KK	Pola Hubungan
2018	89.904.635.200	807.048.799.221	23.721.713.462	10,82%	Instruktif
2019	103.585.928.126	880.007.846.510	28.854.675.527	11,40%	Instruktif
2020	96.873.499.070	791.615.772.467	26.564.141.055	11,84%	Instruktif
Rata-rata	290.364.062.396	2.478.672.418.198	79.140.530.044	11,35%	Instruktif

Sumber : Laporan Realsasi APBD Kab. Manggarai 2018-2020 (data diolah)

Gambar 5.4
Diagram Kemandirian Keuangan



Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Manggarai selama tahun 2018-2020 adalah rendah sekali, yang di tunjukkan oleh rasio kemandirian keuangan yang berada pada rentang antara 0% - 25%. Begitupun dengan rata-rata rasio kemandirian keuangan sebesar 11,35% yang juga pada rentang 0% - 25% selama tahun 2018-2020, Hal ini menunjukan kabupaten Manggarai jika dilihat dari rasio kemandirian masih sangat rendah sekali karena tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern masih sangat tinggi.

Berdasarkan uraian diatas dalam upaya meningkatkan rasio kemandirian keuangan, pemerintah Kabupaten Manggarai perlu meningkatkan potensi pendapatan asli daerah, mengidentifikasi dan mengoptimalkan potensi sumber pendapatan daerah yang belum dimaksimalkan, seperti pengumpulan pajak dan retribusi dengan lebih efisien dan efektif, Mencari sumber pendapatan baru dan beragam di luar transfer dari pemerintah pusat, seperti memanfaatkan potensi pariwisata, pengelolaan sumber daya alam, atau investasi dalam sektor-sektor yang berpotensi memberikan pendapatan tambahan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang perencanaan keuangan, pengumpulan pajak, dan pengelolaan anggaran akan membantu meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan hasil wawancara *“Karena belum maksimalnya penerimaan pajak daerah dimana tim Intensifikasi PBB tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa belum berfungsi baik/optimal sehingga koordinasi petugas pemungut masih lemah, terus masih Terjadi*

penetapan PBB yang dirasakan kurang adil oleh wajib pajak, Obyek dan subyek PBB belum didata secara baik”. (Wawancara Senin, 5 Juni 2023)

c) Rasio Efektifitas PAD

Rasio Efektivitas pendapatan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan realisasi pendapatan yang dianggarkan. (Mahmudi, 2011:170). Analisis rasio efektivitas PAD dapat dihitung menggunakan rumus berikut (Mahmudi 2016:141) :

$$Rasio\ Efektifitas = \frac{Realisasi\ PAD}{Anggaran\ PAD} \times 100\%$$

Tabel 5.10
Kriteria Rasio Efektifitas PAD

Rasio Efektivitas PAD	Kemampuan Keuangan
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90%-99%	Cukup Efektif
75%-89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi, 2010:143

$$\text{Tahun 2018} = \frac{Rp.89.904.635.200}{Rp.95.454.907.404} \times 100\%$$

$$= 94,19\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{Rp.103.585.928.126}{Rp.95.319.150.242} \times 100\%$$

$$= 108,67\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{Rp.96.873.499.070}{Rp.93.295.833.462} \times 100\%$$

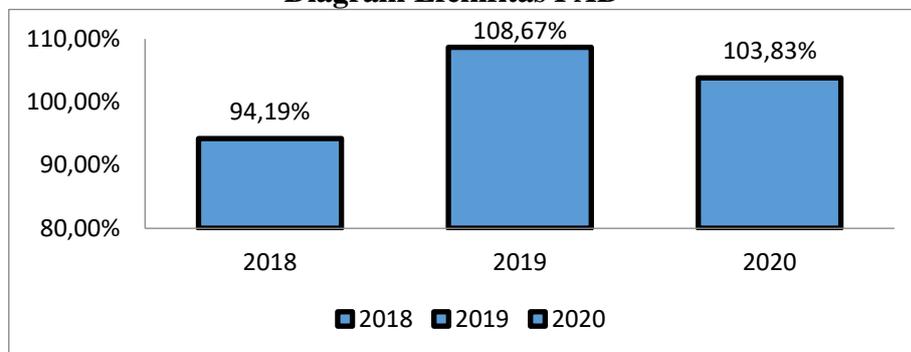
$$= 103,83\%$$

Tabel 5.11
Rasio Efektifitas PAD
Kabupaten Manggarai 2018-2020

Tahun	Realisasi Pendapatan (Rp)	Anggaran Pendapatan (Rp)	Efektifitas PAD	Kemampuan Keuangan
2018	89.904.635.200	95.454.907.404	94,19%	Cukup Efektif
2019	103.585.928.126	95.319.150.242	108,67%	Sangat Efektif
2020	96.873.499.070	93.295.833.462	103,83%	Sangat Efektif
Rata-rata	290.364.062.396	284.069.891.108	102,22%	Sangat Efektif

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kab. Manggarai 2018-2020 (data diolah)

Gambar 5.5
Diagram Efektifitas PAD



Berdasarkan hasil analisis di atas dapat diketahui bahwa rasio efektifitas PAD Kabupaten Manggarai tahun 2018 cukup efektif, dan pada tahun 2019 - 2020 sangat efektif. Adapun rata-rata rasio efektifitas penerimaan PAD sebesar 102,22% pada rentang >100% selama tahun 2018-2020, dimana hal ini mengindikasikan realisasi penerimaan pendapatan daerah sangat efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam 3 tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Manggarai sangat efektif dalam merealisasikan PAD.

Berdasarkan uraian di atas, Pemerintah daerah dapat meningkatkan pengawasan dan penagihan terhadap pajak, retribusi,

dan sumber pendapatan lainnya, mendorong penggalan sumber-sumber pendapatan yang dapat membantu meningkatkan efektivitas PAD. Pemerintah daerah perlu mengidentifikasi potensi sumber pendapatan lain yang belum dimanfaatkan dengan baik, peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi agar masyarakat dapat lebih sadar dan patuh dalam membayar pajak dan retribusi, sehingga dapat meningkatkan penerimaan PAD.

Berdasarkan hasil wawancara “*untuk pengelolaan PAD sudah efektif kecuali pada tahun 2018 saja yang belum mencapai target karena pada tahun itu belum optimalnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah serta tingkat kesadaran masyarakat wajib pajak dan wajib retribusi belum maksimal sehingga realisasi PAD tidak mencapai target*”. (Wawancara Senin, 5 Juni 2023)

d) Rasio Efisiensi PAD

Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Abdul Halim, 2004 : 235). Rasio efisiensi bertujuan untuk menilai apakah sejauh mana efisiensi pemerintah dalam merealisasi pendapatan. Untuk mendapatkan nilai biaya perolehan PAD berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2002 biaya pemungutan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% dari realisasi penerimana pajak daerah.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Perolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 5.12
Kriteria Efisiensi PAD

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
<5%	Sangat Efisien
5-10%	Efisien
11-20%	Cukup Efisien
21-30%	Kurang Efisien
>30%	Tidak Efisien

Sumber : Mahsun, 2011:171

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{4.127.767.689}{89.904.635.200} \times 100\% \\ &= 4,59\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= \frac{3.831.941.822}{103.585.928.126} \times 100\% \\ &= 3,70\% \end{aligned}$$

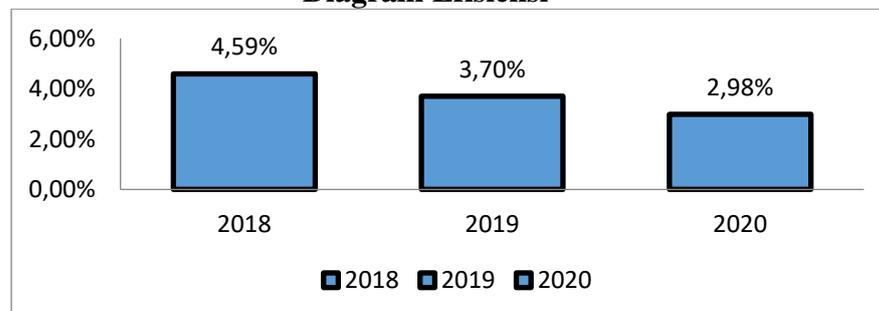
$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020} &= \frac{2.886.325.899}{96.873.499.070} \times 100\% \\ &= 2,98\% \end{aligned}$$

Tabel 5.13
Rasio Efisiensi PAD
Kabupaten Manggarai 2018-2020

Tahun	Biaya Perolehan PAD (Rp)	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Efisiensi	Kriteria
2018	4.127.767.689	89.904.635.200	4,59%	Sangat Efisien
2019	3.831.941.822	103.585.928.126	3,70%	Sangat Efisien
2020	2.886.325.899	96.873.499.070	2,98%	Sangat Efisien
Rata-rata	3.615.345.136	96.788.020.798	3,74%	Sangat Efisien

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kab. Manggarai 2018-2020 (data diolah)

Gambar 5.6
Diagram Efisiensi



Berdasarkan hasil analisis dapat di ketahui bahwa rasio efisiensi penerimaan Kabupaten Manggarai tahun 2018–2020 dalam kategori sangat efisien. Adapun rata-rata rasio efisiensi penerimaan selama tahun 2018-2020 sebesar 3,74% yang berada pada rentang <5%, dimana hal ini mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah Kabupaten Manggarai dalam kategori sangat efisien. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam 3 tahun terakhir pemerintah Kabupaten manggarai sangat efisien dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian diatas terkait dengan efisiensi PAD pemerintah daerah Kabupaten Manggarai sangat baik dalam hal perolehan pendapatan asli daerah sehingga dalam penggunaannya sangat efisien, dimana hal ini sangat baik dalam hal penerimaan pendapatan daerah.

Berdasarkan hasil wawancara “*Kalau untuk pengelolaan PAD itu sudah efisien sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga pada tahun 2018-2020 itu sudah sangat efisien*”. (Wawancara Senin, 5 Juni 2023)

4 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Ketergantungan keuangan daerah merujuk pada sejauh mana pemerintah daerah bergantung pada sumber pendapatan dari pemerintah pusat. Tujuannya untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah pada transfer anggaran dari pemerintah pusat dan meningkatkan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan asli daerah secara mandiri.

$$\text{Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 5.14
Kriteria Ketergantungan Keuangan Daerah

Skala Interval Ketergantungan Keuangan Daerah %	Ketergantungan Keuangan Daerah
00,00 – 10,00	Sangat Rendah
10,00 – 20,00	Kurang
20,00 – 30,00	Sedang
30,00 – 40,00	Cukup
40,00 – 50,00	Tinggi
>50,00	Sangat Tinggi

Sumber : Putra, 2018:62

$$\text{Tahun 2018} = \frac{956.555.834.690}{1.097.948.217.140} \times 100\%$$

$$= 87,12\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{1.057.995.476.037}{1.229.400.675.074} \times 100\%$$

$$= 86,06\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{791.615.772.467}{1.156.337.467.137} \times 100\%$$

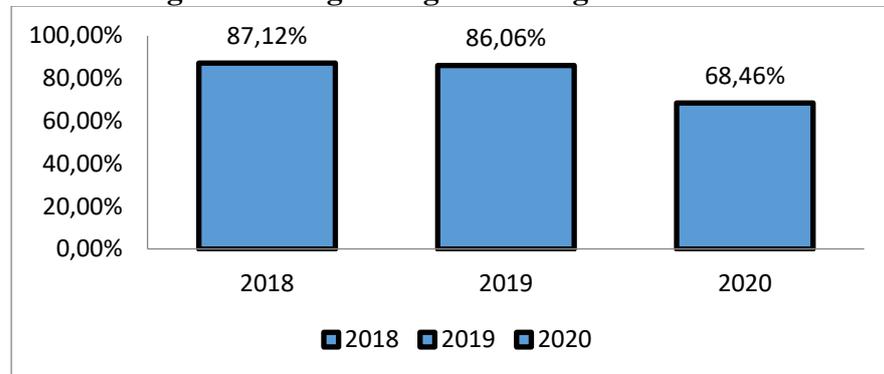
$$= 68,46\%$$

Tabel 5.15
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Kabupaten Manggarai 2018-2020

Tahun	Pendapatan Transfer	Total Penerimaan Daerah	%	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
2018	956.555.834.690	1.097.948.217.140	87,12%	Sangat Tinggi
2019	1.057.995.476.037	1.229.400.675.074	86,06%	Sangat Tinggi
2020	818.179.913.522	1.156.337.467.137	68,46%	Sangat Tinggi
Rata-rata	2.806.167.083.194	3.483.686.359.351	80,55%	Sangat Tinggi

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kab. Manggarai 2018-2020 (data diolah)

Gambar 5.7
Diagram Ketergantungan Keuangan Daerah



Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Manggarai tahun 2018–2020 dalam kategori sangat tinggi. Adapun rata-rata rasio ketergantungan keuangan daerah selama tahun 2018-2020 sebesar 80,55% yang berada pada rentang >50,00%, dimana hal ini mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah Kabupaten Manggarai masih ketergantungan terhadap pemerintah pusat dengan kategori sangat tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam 3 tahun terakhir pemerintah Kabupaten manggarai cenderung tergantung pada pemerintah pusat.

Berdasarkan uraian diatas pemerintah daerah dalam rangka untuk mengurangi ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Manggarai perlu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan dan alokasi anggaran untuk memaksimalkan potensi pendapatan, dan menggali potensi sumber pendapatan daerah dengan memanfaatkan potensi ekonomi dan mengoptimalkan pajak dan retribusi daerah. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang

keuangan dan pajak dapat membantu meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan daerah. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan ekonomi dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan Hasil wawancara “Karena Keuangan daerah yang bersumber dari PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar PAD terhadap total pendapatan daerah maka akan memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerah. jadi, pemerintah daerah belum mampu dibiayai dengan PAD yang ada. ketergantungan itu juga karena belum maksimalnya pengelolaan PAD untuk meminimalisir pendanaan dari pemerintah pusat maupun provinsi”. (Wawancara Senin, 5 Juni 2023)

b. Analisis Kinerja Belanja Daerah

Kinerja belanja daerah adalah ukuran sejauh mana pemerintah daerah dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan melalui penggunaan dana yang telah dianggarkan. Kinerja belanja daerah dapat diukur melalui Varians Belanja, Efisiensi Belanja, Pertumbuhan Belanja, Analisis Rasio Keserasian, Belanja Operasi, dan Belanja Modal. Berikut ini akan dijabarkan data Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2018-2020 sebagai berikut :

Tabel 5.16
Data Belanja Daerah Kabupaten Manggarai
Tahun 2018-2020

Akun	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Daerah	951.374.429.124	909.069.031.010	95,55	1.244.413.520.445	1.187.342.937.347	95,41	1.204.202.823.841	1.141.487.429.304	94,79
Belanja Langsung	942.556.229.124	901.122.973.866	95,60	1.015.783.327.752	959.121.435.927	94,42	926.945.061.000	877.809.094.967	94,70
Belanja Tidak Langsung	388.523.609.161	374.432.082.092	96,37	691.191.898.858	671.691.519.136	97,18	753.515.700.956	727.278.183.483	96,52
Belanja Operasi	669.924.210.152	638.275.541.136	95,28	964.374.389.406	925.333.510.983	95,95	964.866.411.791	911.683.013.797	94,49
Belanja Modal	279.950.218.972	270.097.299.924	96,48	277.829.131.039	260.133.775.217	93,63	203.670.447.869	206.921.382.491	101,60

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kab. Manggarai 2018-2020 (data diolah)

Tabel 5.13 menunjukkan data target dan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Manggarai tahun 2018-2020. Adapun perhitungan rasio yang dapat dihasilkan sebagai berikut:

1 Analisis Varians (selisih) Belanja

Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi dengan anggaran. Berdasarkan laporan realisasi anggaran yang disajikan, pembaca laporan dapat mengetahui secara besarnya varians anggaran belanja dengan realisasinya yang biasa dinyatakan dalam bentuk nilai nominalnya atau persentasenya (Mardiasmo : 2004).

Varians belanja = Realisasi Belanja – Anggaran Belanja

Tabel 5.17
Kriteria Varians (selisih) Belanja

Varians Belanja	Kriteria
Varians positif atau realisasi belanja > anggaran belanja	Kurang baik
Varians negative atau realisasi belanja ≤ anggaran belanja	Baik

Sumber : Mahmudi, 2010:157

Tahun 2018 = Rp. 909.069.031.010 - Rp. 951.374.429.124
= Rp. (42.305.398.114)

Tahun 2019 = Rp. 1.187.342.937.347 – Rp. 1.244.413.520.445
= Rp. (57.070.583.098)

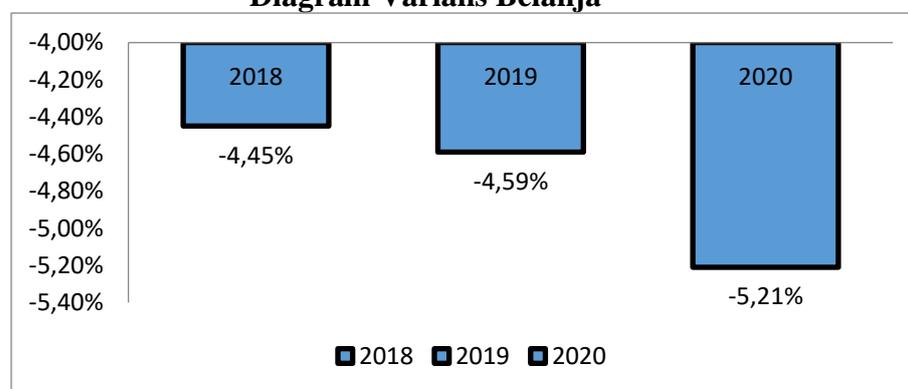
Tahun 2020 = Rp. 1.141.487.429.304- Rp. 1.204.202.823.841
= Rp. (62.715.394.537)

Tabel 5.18
Varians (selisih) Belanja
Kabupaten Manggarai 2018-2020

Tahun	Belanja (Rp)		Varians(Rp)	Varians %	Kinerja
	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)			
2018	909.069.031.010	951.374.429.124	(42.305.398.114)	-4,45%	Baik
2019	1.187.342.937.347	1.244.413.520.445	(57.070.583.098)	-4,59%	Baik
2020	1.141.487.429.304	1.204.202.823.841	(62.715.394.537)	-5,21%	Baik
Rata-rata	1.079.299.799.220	1.133.330.257.803	(54.030.458.583)	-4,75%	Baik

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kab. Manggarai 2018-2020 (data diolah)

Gambar 5.8
Diagram Varians Belanja



Berdasarkan hasil analisis dapat di ketahui bahwa pengelolaan belanja daerah Kabupaten Manggarai selama tahun 2018-2020 memiliki kinerja yang baik. Adapun rata-rata realisasi belanja bernilai sebesar (4,75%) atau sebesar (54.030.458.583), dimana hal ini juga mengindikasikan pengelolaan belanja daerah memiliki kinerja baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam 3 tahun terakhir pemerintah Kabupaten Manggarai mampu mengurangi belanja daerah di bawah dari target belanja yang sudah di anggarkan sebelumnya.

Berdasarkan uraian diatas diharapkan pemerintah tetap menjaga kesetabilan, meskipun terdapat selisih antara anggaran dan realisasi belanja. Hal ini menunjukkan konsistensi pemerintah dalam menjaga

pengelolaan belanja daerah agar tetap berada dalam batas anggaran yang ditetapkan. Dengan Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada agar dana anggaran dapat digunakan secara efisien dan efektif.

Berdasarkan hasil wawancara *untuk realisasi anggaran belanja pemerintah daerah Kabupaten Manggarai selama tahun 2018-2020 berjalan dengan baik bisa kita lihat pada laporan realisasinya dimana realisasi tidak ada yang melebihi anggaran yang sudah ditetapkan* (Wawancara Senin, 5 Juni 2023)

2 Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolute, tetapi relative. Artinya, tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Kita hanya dapat mengatakan bahwa tahun ini belanja pemerintah daerah lebih efisien dibanding tahun sebelumnya. Pemerintah daerah di nilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, Sebaliknya jika melebihi 100% maka mengidentifikasi terjadinya pemborosan anggaran (Abdul Halim : 2004).

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 2.19
Kriteria Efisiensi Belanja

Kemampuan Keuangan	Rasio Efisiensi Belanja
Efisien	<100%
Tidak Efisien	>100%

Sumber : Mahmudi, 2010, 164–165

$$\text{Tahun 2018} = \frac{\text{Rp. 909.069.031.010}}{\text{Rp. 951.374.429.124}} \times 100\%$$

$$= 95,55\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{\text{Rp.1.187.342.937.347}}{\text{Rp.1.244.413.520.445}} \times 100\%$$

$$= 95,41\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{\text{Rp. 1.141.487.429.304}}{\text{Rp. 1.204.202.823.841}} \times 100\%$$

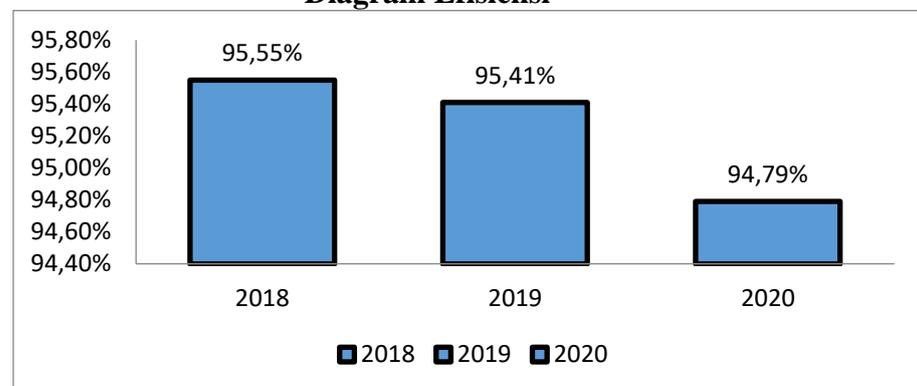
$$= 94,79\%$$

Tabel 5.20
Efisiensi Belanja
Kabupaten Manggarai 2018-2020

Tahun	Realisasi Belanja (Rp)	Anggaran Belanja (Rp)	Efisiensi Belanja	Kemampuan Keuangan
2018	909.069.031.010	951.374.429.124	95,55%	Efisien
2019	1.187.342.937.347	1.244.413.520.445	95,41%	Efisien
2020	1.141.487.429.304	1.204.202.823.841	94,79%	Efisien
Rata-rata	1.079.299.799.220	1.133.330.257.803	95,25%	Efisien

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kab. Manggarai 2018-2020 (data diolah)

Gambar 5.9
Diagram Efisiensi



Berdasarkan hasil analisis dapat di ketahui bahwa rasio efisiensi belanja Kabupaten Manggarai selama tahun 2018-2020 memiliki kinerja yang efisien, yang di tunjukkan oleh nilai rasio efisiensi belanja nilainya kurang dari 100%. Adapun rata-rata rasio efisiensi belanja sebesar 95,25% juga lebih kecil dari 100%, dimana hal ini menunjukkan bahwa

dalam 3 tahun terakhir tingkat penghematan anggaran belanja yang dilakukan pemerintah Kabupaten Manggarai berjalan dengan baik.

Berdasarkan uraian diatas penggunaan belanja daerah Kabupaten Manggarai menunjukkan bahwa Kinerja efisiensi belanja tetap konsisten selama tiga tahun terakhir (2018-2020). Pemerintah Kabupaten Manggarai berhasil mengelola belanja dengan baik dan tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Dan juga pemerintah diharapkan agar tetap menjaga kesetabilan Efisiensi belanja karena sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan dan memastikan penggunaan anggaran secara tepat sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara “Ya, untuk belanja daerah pada tahun itu sangat efisien, bisa kita lihat bahwa realisasinya tidak ada yang melebihi dari anggaran yang sudah ditetapkan”. (Wawancara Senin, 5 Juni 2023)

3 Analisis Rasio Pertumbuhan Belanja

$$PB_{Th\ t} = \frac{\text{Belanja Th } t - \text{Belanja Th } (t - 1)}{\text{Belanja Th } (t - 1)} \times 100\%$$

Tabel 5.21
Kriteria Pertumbuhan Belanja

Rasio Pertumbuhan Belanja	Kriteria
Pertumbuhan Belanja \leq Pertumbuhan Pendapatan	Baik
Pertumbuhan Belanja \geq Pertumbuhan Pendapatan	Kurang baik

Sumber : Mahmudi, 2010:160

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{\text{Rp.909.069.031.010} - \text{Rp.877.971.049.259}}{\text{Rp.877.971.049.259}} \times 100\% \\ &= 3,54\% \end{aligned}$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{\text{Rp.1.187.342.937.347} - \text{Rp.909.069.031.010}}{909.069.031.010} \times 100\%$$

= 30,61%

$$\text{Tahun 2020} = \frac{\text{Rp.1.141.487.429.304} - \text{Rp.1.187.342.937.347}}{\text{Rp.1.187.342.937.347}} \times 100\%$$

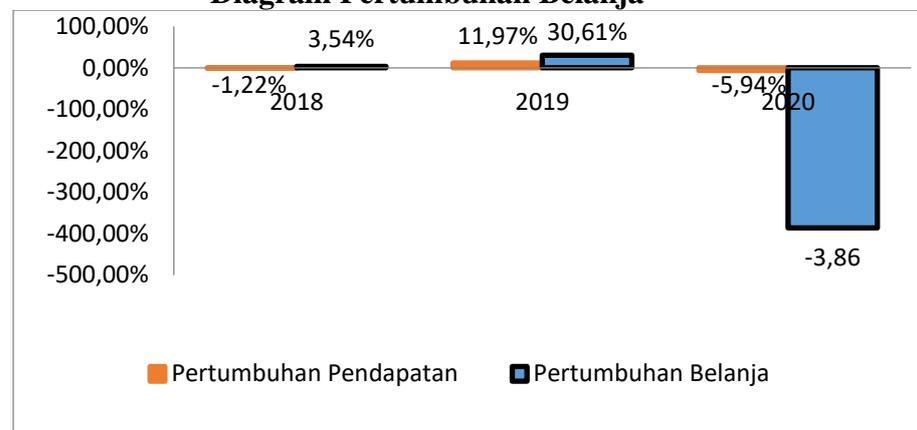
= (3,86)

Tabel 5.22
Pertumbuhan Belanja
Kabupaten Manggarai 2018-2020

Tahun	Belanja (Rp)	Pertumbuhan Pendapatan %	Pertumbuhan Belanja %	Kinerja Belanja
2017	877.971.049.259	-	-	
2018	909.069.031.010	-1,22%	3,54%	Kurang Baik
2019	1.187.342.937.347	11,97%	30,61%	Kurang Baik
2020	1.141.487.429.304	-5,94%	-3,86%	Kurang Baik
Rata-rata	4.115.870.446.920	1,30%	10,10%	Kurang Baik

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kab. Manggarai 2018-2020 (data diolah)

Gambar 5.10
Diagram Pertumbuhan Belanja



Berdasarkan hasil analisis dapat di ketahui bahwa pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Manggarai tahun 2018-2020 memiliki kinerja pertumbuhan yang kurang baik. Adapun rata-rata pertumbuhan belanja tahun 2018-2020 yaitu 10,10% yang lebih besar dari pada pertumbuhan pendapatan 1,30% yang menyatakan kinerja pertumbuhan belanja kurang baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam 3 tahun terakhir pemerintah

Kabupaten Manggarai kurang baik untuk mengimbangi pertumbuhan belanja daerahnya dengan pertumbuhan pendapatannya.

Berdasarkan uraian diatas, diharapkan pemerintah Kabupaten Manggarai lebih teliti dalam Mengimplementasikan sistem pengendalian belanja untuk mencegah dan memastikan dana digunakan tepat sasaran, dan juga untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah dan juga pemerintah Kabupaten Manggarai harus melakukan evaluasi secara terus menerus terhadap kinerja belanja dan pendapatan untuk mengidentifikasi potensi perbaikan dan pengoptimalan anggaran. Dengan demikian diharapkan kinerja pertumbuhan belanja Kabupaten Manggarai dapat ditingkatkan dan diimbangi dengan pertumbuhan pendapatan yang lebih seimbang, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan secara berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil wawancara *“Proses belanja tidak dapat dipisahkan dari proses perencanaan anggaran. Mekanisme penyusunan anggaran sangat berpengaruh pada kualitas belanja. Sistem penganggaran berbasis kinerja yang saat ini diterapkan mendorong proses penyusunan anggaran menjadi lebih terukur, sehingga berdampak juga ke pertumbuhan belanja dan belanja daerah tidak diimbangi dengan pertumbuhan pendapatan daerah. Apalagi pada tahun 2020 itu belanja daerah lebih besar pengeluarannya dalam upaya pemerintah menangani pandemik itu”*. (Wawancara Senin, 5 Juni 2023)

4 Analisis Rasio Keserasian

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja secara optimal. Analisis keserasian belanja antara lain berupa :

a) Belanja Langsung

Belanja langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Tabel 5.23
Kriteria Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

BL dan BTL	Kriteria
Rasio BL > Rasio BTL	Baik
Rasio BL ≤ Rasio BTL	Kurang baik

Sumber : Mahmudi, 2010:164-165

$$\text{Belanja Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{901.122.973.866}{909.069.031.010} \times 100\%$$

$$= 99,13\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{959.121.435.927}{1.187.342.937.347} \times 100\%$$

$$= 80,78\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{877.809.094.967}{1.141.487.429.304} \times 100\%$$

$$= 76,90\%$$

b) Belanja Tidak Langsung(BTL)

Belanja tidak langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

$$\text{BTL} = \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{374.432.082.092}{909.069.031.010} \times 100\% \\ &= 41,19\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= \frac{671.691.519.136}{1.187.342.937.347} \times 100\% \\ &= 56,57\% \end{aligned}$$

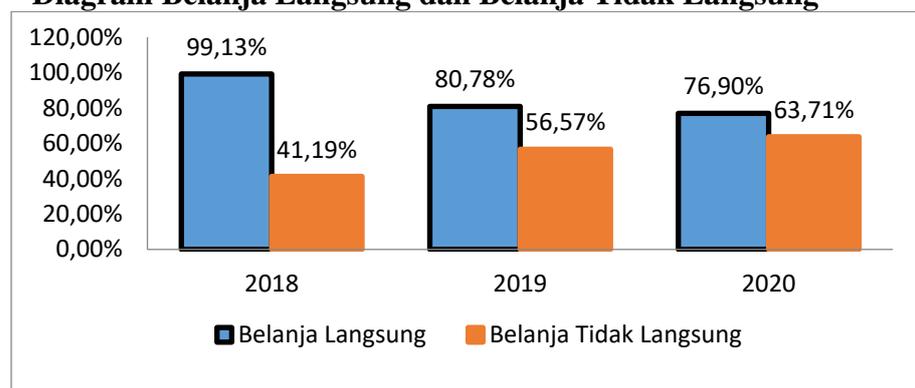
$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020} &= \frac{727.278.183.483}{1.141.487.429.304} \times 100\% \\ &= 63,71\% \end{aligned}$$

Tabel 5.24
Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung
Kabupaten Manggarai 2018-2020

Tahun	Belanja Langsung (Rp)	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Daerah (Rp)	BL%	BTL%	Kinerja
2018	901.122.973.866	374.432.082.092	909.069.031.010	99,13%	41,19%	Baik
2019	959.121.435.927	671.691.519.136	1.187.342.937.347	80,78%	56,57%	Baik
2020	877.809.094.967	727.278.183.483	1.141.487.429.304	76,90%	63,71%	Baik
Rata-rata	912.684.501.587	591.133.928.237	1.079.299.799.220	85,60%	53,82%	Baik

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kab. Manggarai 2018-2020 (data diolah)

Gambar 5.11
Diagram Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung



Berdasarkan hasil analisis dapat di ketahui bahwa rasio belanja langsung dan tidak langsung terhadap total belanja di Kabupaten

Manggarai selama tahun 2018-2020 memiliki kinerja yang baik, yang di tunjukkan oleh nilai rasio belanja langsung yang nilainya lebih tinggi dari belanja tidak langsung. Begitupun rata-rata rasio belanja langsung sebesar 85,60% yang lebih besar dari rasio belanja tidak langsung yaitu 53,82%, dimana hal ini mengindikasikan kinerja belanja langsung dan belanja tidak langsung pemerintah Kabupaten Manggarai 2018-2020 dalam kategori baik.

Kinerja belanja langsung dan tidak langsung Kabupaten Manggarai selama tahun 2018-2020 dikategorikan baik, pemerintah daerah harus melakukan evaluasi secara berkelanjutan untuk memastikan kebijakan alokasi anggaran telah tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat, Serta Mengimplementasikan mekanisme pengendalian belanja yang ketat untuk mencegah dan memastikan efisiensi penggunaan anggaran, dan juga Melakukan monitoring kinerja program dan kegiatan yang dibiayai dari anggaran belanja langsung dan tidak langsung untuk memastikan hasil yang sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil wawancara “*Kinerja belanja langsung dan belanja tidak langsung sangat bergantung pada sumber pendanaan dan proses pelaksanaan belanjanya sejak perencanaan, anggaran. Sehingga kegiatan belanja kurang tepat dalam hal ini pemerintah daerah lebih fokus pada belanja langsung daripada belanja tidak langsung dan pada tahun 2020 pemerintah daerah lebih kepada menangani pandemi sehingga pengeluaran lebih besar*”. (Wawancara Senin, 5 Juni 2023)

c) Rasio Belanja Operasi

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 5.25
Kategori Tingkat Belanja

Kemampuan Keuangan	Rasio Belanja Modal dan Belanja Operasi
Tidak Baik	0% - 50%
Baik	50% -100%

Sumber : (Halim 2007:236)

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{\text{Rp.638.275.541.136}}{\text{Rp.909.069.031.010}} \times 100\% \\ &= 70,21\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= \frac{\text{Rp.925.333.510.983}}{\text{Rp.1.187.342.937.347}} \times 100\% \\ &= 77,93\% \end{aligned}$$

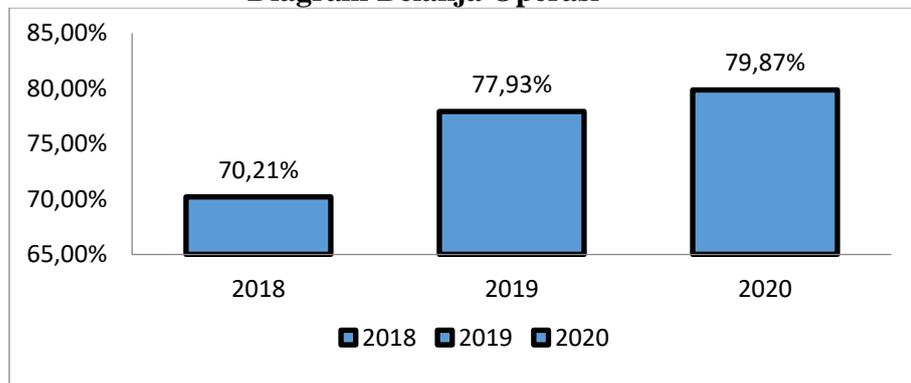
$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020} &= \frac{\text{Rp.911.683.013.797}}{\text{Rp.1.141.487.429.304}} \times 100\% \\ &= 79,87\% \end{aligned}$$

Tabel 5.26
Rasio Belanja Operasi
Kabupaten Manggarai 2018-2020

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Daerah	Persentase Belanja Operasi	Kemampuan Keuangan
2018	638.275.541.136	909.069.031.010	70,21%	Baik
2019	925.333.510.988	1.187.342.937.347	77,93%	Baik
2020	911.683.013.797	1.141.487.429.304	79,87%	Baik
Rata-rata	825.097.355.307	1.079.299.799.220	76,00%	Baik

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kab. Manggarai 2018-2020 (data diolah)

Gambar 5.12
Diagram Belanja Operasi



Berdasarkan hasil analisis dapat di ketahui bahwa rasio belanja operasi Kabupaten Manggarai selama tahun 2018-2020 memiliki kinerja yang baik, yang di tunjukkan oleh nilai rasio belanja operasi nilainya lebih dari kriteria yang ditentukan yaitu 0%-50%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam 3 tahun terakhir tingkat belanja operasi yang di lakukan pemerintah Kabupaten Manggarai berjalan dengan baik.

Berdasarkan uraian diatas kinerja belanja operasi di Kabupaten Manggarai selama tahun 2018-2020 dikategorikan baik, pemerintah daerah harus melakukan pengawasan yang ketat dalam penggunaan anggaran operasi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran operasi agar dapat mengalokasikan lebih banyak dana untuk program dan kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara “*Untuk belanja operasi pemerintah daerah sangat baik. Karena belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan kegiatan yang dilakukan*”. (Wawancara Senin, 5 Juni 2023)

d) Rasio Belanja Modal

Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Adapun rumus perhitungannya sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{\text{Rp. 270.097.299.924}}{\text{Rp. 909.069.031.010}} \times 100\% \\ &= 29,71\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= \frac{\text{Rp. 260.133.775.217}}{\text{Rp. 1.187.342.937.347}} \times 100\% \\ &= 21,91\% \end{aligned}$$

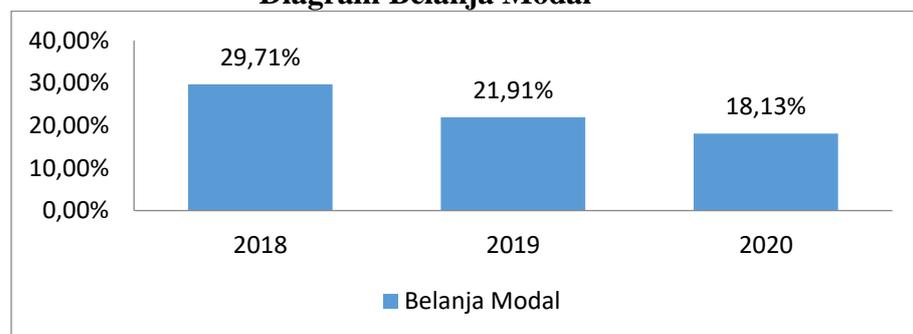
$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020} &= \frac{\text{Rp. 206.921.382.491}}{\text{Rp. 1.141.487.429.304}} \times 100\% \\ &= 18,13\% \end{aligned}$$

Tabel 5.27
Rasio Belanja Modal
Kabupaten Manggarai 2018-2020

Tahun	Belanja Modal	Belanja Daerah	Persentase Belanja Modal	Kemampuan Keuangan
2018	270.097.299.924	909.069.031.010	29,71%	Tidak Baik
2019	260.133.775.217	1.187.342.937.347	21,91%	Tidak Baik
2020	206.921.382.491	1.141.487.429.304	18,13%	Tidak Baik
Rata-rata	245.717.485.877	1.079.299.799.220	23,25%	Tidak Baik

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kab. Manggarai 2018-2020 (data diolah)

Gambar 5.13
Diagram Belanja Modal



Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa rasio belanja modal Kabupaten Manggarai selama tahun 2018-2020 memiliki kinerja yang tidak baik, yang di tunjukkan oleh nilai rasio belanja modal nilainya yang berkisaran diantara 0%-50%. Adapun rata-rata rasio belanja modal sebesar 23,25% dan juga yang berkisaran antara 0%-50%,

dimana hal ini menunjukkan bahwa dalam 3 tahun terakhir anggaran belanja modal yang di lakukan pemerintah Kabupaten Manggarai tidak baik.

Rendahnya belanja modal disebabkan karena kurangnya dana yang tersedia, prioritas pengalokasian anggaran yang tidak tepat, kendala administratif, atau masalah perencanaan pembangunan, perlu dilakukan analisis lebih lanjut dalam hal ini penting untuk memastikan bahwa dana yang tersedia dialokasikan untuk proyek-proyek pembangunan yang memiliki dampak jangka panjang dan manfaat yang besar bagi masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kinerja belanja modal, Diperlukan perencanaan yang matang untuk mencapai tingkat belanja modal yang lebih optimal sehingga pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara “*Karena Belanja modal itu sangat bergantung pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), ketika kondisi sumber dana dimaksud terbatas atau terjadinya keterlambatan transfer maka sangat berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Belanja masih kurang memaksimalkan belanja tidak langsung dan untuk tahun 2020 sebagian belanja modal pemerintah daerah dialihkan mendanai belanja bantuan sosial bagi yang terkena dampak pandemi*”. (Wawancara Senin, 5 Juni 2023)

c. Analisis Kinerja Pembiayaan Daerah

$$\text{SiLPA} = \text{Surplus} + \text{Pembiayaan Netto}$$

Tabel 5.28
Pembiayaan Daerah

SiLPA	Kriteria
< 5%	Baik (Sehat)
> 5%	Kurang baik (tidak sehat)

Sumber : Mahmudi, 2010:17

Tahun 2018 = Rp. 393.427.972 + Rp. 29.029.488.206

= Rp. 29.422.916.178

Tahun 2019 = Rp. 42.057.737.727 + Rp. 19.238.734.054

= Rp. 61.296.471.781

Tahun 2020 = Rp. 14.850.037.832 + Rp. 48.333.920.021

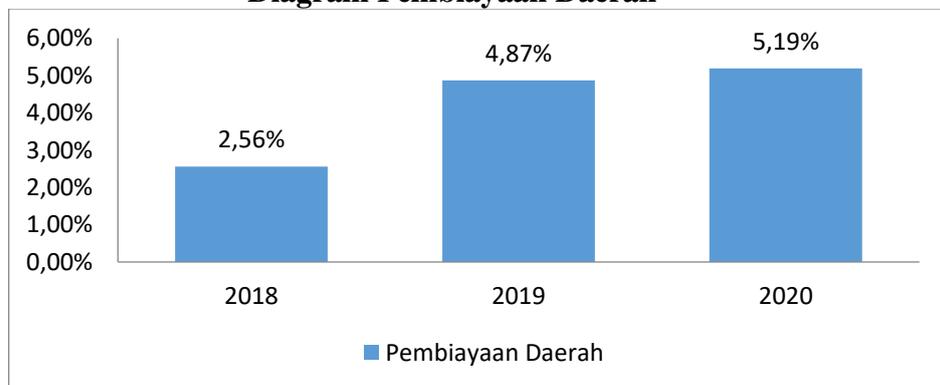
= Rp. 63.183.957.853

Tabel 5.29
Pembiayaan Daerah
Kabupaten Manggarai 2018-2020

Tahun	Realisasi(Rp)		SiLPA(%)	Kriteria SiLPA
	SiLPA	Total Pendapatan + Penerimaan Pembiayaan		
2018	29.422.916.178	1.147.957.705.346	2,56%	Sehat
2019	61.296.471.781	1.258.389.409.128	4,87%	Sehat
2020	63.183.957.853	1.217.135.826.111	5,19%	Tidak Sehat
Rata-rata	153.903.345.812	3.623.482.940.585	4,21%	Sehat

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kab. Manggarai tahun 2018-2020 (data diolah)

Gambar 5.14
Diagram Pembiayaan Daerah



Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa rata-rata pembiayaan pemerintah Kabupaten Manggarai selama tahun 2018-2019 memiliki kinerja yang sehat, yang di tunjukkan oleh SiLPA yang kurang dari 5%, dan pada tahun 2020 memiliki kinerja SiLPA yang kurang baik yakni > 5%. Adapun rata-rata pembiayaan sebesar Rp.153,90 milyar

dengan presentase rata-rata sebesar 4,25% dimana hal ini dilihat dari rata-rata pembiayaan pemerintah Kabupaten Manggarai mengindikasikan kinerja pembiayaan daerah selama 3 tahun cenderung dalam kategori sehat.

Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi dan perencanaan lebih lanjut untuk mengatasi kinerja pembiayaan yang kurang baik pada tahun 2020, perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap anggaran dan pembiayaan tahun tersebut. Pemerintah daerah perlu meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran, melakukan perencanaan pembangunan yang lebih matang, dan memastikan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan berjalan sesuai rencana. Dengan demikian, pembiayaan dapat dioptimalkan dan kinerja pembiayaan daerah dapat kembali mencapai tingkat sehat seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara “*Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya yang ada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan*”. (Wawancara Senin, 5 Juni 2023)